



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : RSJD SURAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SRI HANDAYANI**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN & VERIFIKASI**
3. NHK : **212829**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **390.000.000**

1. Tanah Seluas 300 m2 di SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp.  
55.000.000
2. Tanah Seluas 149 m2 di SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp.  
50.000.000
3. Tanah Seluas 670 m2 di SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp.  
110.000.000
4. Tanah Seluas 1223 m2 di SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp.  
175.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **176.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 1996, HASIL SENDIRI  
Rp. 15.000.000
2. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp.  
35.000.000
3. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T Tahun 2014, HASIL  
SENDIRI Rp. 120.000.000
4. MOTOR, HONDA NF125 TR M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.  
6.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **28.000.000****D. SURAT BERTHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **133.755.086****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----**

**Sub Total** Rp. **728.255.086**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 728.255.086

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.